PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Selasa Tanggal: 23 Februari 2021 Halaman: 5

Memutus Mata Rantai Penularan

PPKM di DIY Kembali Diperpanjang Dua Pekan

TEKAN PENYEBARAN VIRUS

- Pemda DIY kembali memperpanjang PPKM selama dua pekan.
- PPKM keempat dimulai 23 Februari Hingga 8 Maret
- Pemerintah tidak melakukan perubahan atau modifikasi aturan.
- Diharapkan grafik penyintas Covid-19 semakin menurun.

YOGYA, TRIBUN - Kebijakan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali diperpanjang selama dua pekan. PPKM jilid keempat ini dimulai pada 23 Februari hingga 8 Maret 2021 mendatang.

Keputusan perpanjangan di DI Yogyakarta tercantum dalam Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM berbasis Mikro di DIY untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

"PPKM-nya kami perpanjang. Hari ini (kemarin, ***Red***) ditandatangani Ingub-nya, sama dengan keputusan pusat. Perpanjang sampai tanggal 8 Maret," jelas Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji di kantornya, kemarin (22/2).

Aji menjelaskan, pada PPKM jilid keempat ini pemerintah pusat tidak melakukan perubahan atau modifikasi aturan. Pada prinsipnya PPKM masih ditujukan untuk melakukan pengendalian penularan Covid-19 berskala mikro. Misalnya di kelurahan, desa, hingga RT atau RW.

"Tidak ada perbedaan aturan. Saya kira sama dengan kemarin karena modifikasi awal RT RW posko tapi sekarang sudah diakomodasi pusat jadi kita ikut," terangnya.

Tiap RT yang ada di DIY masih akan dikelompokkan berdasarkan zona warna. Pengelompokan zona ditentukan berdasarkan tingkat risiko penularan Covid-19. Itu akan menjadi acuan untuk penanganan penularan Covid-19 di RT-RT.

Aji kemudian melaporkan hasil evaluasi pemberlakuan PPKM periode sebelumnya. Berdasarkan laporan Gugus Tugas Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum, kedisiplinan masyarakat telah mengalami peningkatan.

Terkait perkembangan kasus terkonfirmasi harian, saat ini rata-rata terjadi penambahan sebanyak 200 kasus positif perharinya. Adapun perbandingan antara penambahan kasus dan kesembuhan pasien rata-rata hampir sama.

"Yang sembuh dan positif rata-rata imbang. Beberapa kali lebih banyak positif beberapa kali beberapa sembuh," jelasnya.

Terkait penurunan sampel yang dites untuk mendeteksi Covid-19, Aji menjelaskan bahwa tes saat ini dilakukan hanya berdasarkan hasil tracing. Saat ini gugus tugas rata-rata melakukan tes terhadap 600 hingga 700 sampel perhari. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Di mana dalam sehari terdapat sekitar 1.000 sampel yang dites.

"Pemeriksaan tergantung pada hasil tracing. Kalau hasil tracing tidak banyak jadi tes juga tidak banyak," terangnya.

"Kita tidak ingin mengambil sembarang sampel. Walaupun banyak ambil sampel tidak ada artinya kalau hanya sembarang," sambung Aji.

Lebih jauh Aji juga mengin-formasikan tingkat keterisian tempat tidur di RS rujukan Covid -19. Saat ini telah terisi sebanyak 51,6 persen. Adapun total kapasitas tempat tidur yang tersedia adalah 470 bed. Rinciannya adalah 55 bed critical atau ICU dan 415 bed non critical.

Fluktuatif

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menjelaskan, keputusan memperpanjang berada di tangan pemerintah pusat dan akan kembali berlaku di seluruh Pulau Jawa dan Bali.

"Ya wong saya disuruh perpanjang ya diperpanjang," terang Sri Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan.

Sultan HB X menjelaskan, walaupun sempat terjadi penurunan kasus Covid-19 di DI Yogyakarta, namun tren perkembangan kasus masih bersifat fluktuatif. Selain itu, DIY juga dikelilingi oleh zona merah. Sehingga jika tidak ada pembatasan dikhawatirkan akan memperparah kondisi penularan di wilayah yang dipimpinnya.

"Kita (zona) hijau kalau lingkungannya merah ya mesti ikut merah, cuma waktunya saja jadi sudah merah semua. Harapannya sudah turun (kasus) semua, harapannya kan gitu," terangnya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, agar PPKM Mikro berjalan efektif, tiap jenjang pemerintahan harus benar-benar berjalan beriringan. Sehingga, pihaknya tidak dapat mengambil keputusan sepihak.

"Supaya ini efektif, memang butuh gerakan yang serentak, untuk menekan persebaran, dan memutus rantai penularan virus corona," kata Heroe.

Oleh sebab itu, Pemkot Yogyakarta masih menantikan instruksi dari pemerintah pusat, maupun provinsi sebelum melakukan tindak lanjut. Walau begitu, ia meyakini, esensi perpanjangan PPKM Mikro ini masih serupa.

"Soal teknisnya, ya kita ikut pusat dan provinsi lah. Kalau kita tidak sama, penerapannya akan susah. Sebab, kalau tidak ada keseragaman satu sama lain, nanti kan pelaksanannya di lapangan bakal susah itu," tambah Wawali.

Lebih lanjut, Heroe memaparkan, penerapan PPKM selama tiga jilid beruntun di Kota Yogyakarta mulai menunjukkan hasil bagus. Menurutnya, kasus Covid-19 perlahan makin menurun, ketika dilihat dari grafik tingguan. **(tro/aka)**

Yogyakarta, ...
Kepala

Ttd

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005